

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya untuk peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dan berdasarkan kemampuan nasional. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk. Pembangunan nasional meliputi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Menurut Sumadi & Prathama (2021) pembangunan nasional salah satunya dengan mewujudkan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat. Indikasi tercapainya suatu pembangunan ekonomi yaitu dari perekonomian yang meningkat, kesempatan kerja yang luas, minimnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pelaku utama pembangunan itu sendiri adalah masyarakat, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk membina dan melindungi serta membangun lingkungan yang aman, nyaman dan damai untuk mendukung pembangunan nasional. Pembangunan adalah upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memengaruhi masa depannya. Pembangunan membawa perubahan yang lebih baik dari taraf hidup sebelumnya. Pembangunan di era globalisasi saat ini sangat bertumpu pada sektor ekonomi sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah. Pembangunan harus mengikutsertakan peran masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus sebagai pihak yang akan merasakan pembangunan karena pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan yang terpusat dan tidak merata, juga tidak diimbangi dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik, demokratis dan berkeadilan maka akan

menimbulkan pembangunan ekonomi yang rapuh (Ir. Braman Setyo, 2016).

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih jauh tertinggal dari negara tetangga. Bahkan saat ini, Indonesia masih disebut sebagai negara berkembang bukan negara maju. Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Lembaga *think-tank* asal Amerika Serikat (AS) yakni *Centre for Economics dan Business Research* (CEBR) memprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan memasuki jajaran 10 besar negara dengan perekonomian terbesar yang ada di dunia pada tahun 2035 (Sindonews.com, 2021). *World Economic League Table* (WELT) yang diterbitkan oleh CEBR melaporkan bahwa ekonomi Indonesia akan berada pada urutan kedelapan, bahkan mengalahkan Brasil, Rusia, Korea Selatan, Kanada, Spanyol, Italia, dan Australia, yang berada di peringkat 9 hingga 15 negara. *Standard Chartered* juga menempatkan Indonesia sebagai perekonomian terbesar keempat dunia pada tahun 2030 dengan nilai 10,1 triliun USD setelah China, India, dan Amerika Serikat. Lonjakan ini sejalan dengan berlanjutnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Asia yang pada tahun 2030 mencapai 35% atau setara dengan gabungan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dalam hal ini Menteri Keuangan menekankan optimisme tersebut melalui visi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Sebagaimana terdapat pada pemberitaan yang dimuat Sindonews.com (2021):

“Bahkan, pada 2024 mendatang RI akan menempati peringkat kelima dengan PDB tertinggi di dunia setelah China, AS, India, dan Jepang. Standard Chartered juga menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ekonomi terbesar dunia pada 2030 dengan nilai USD10,1 triliun di bawah China, India, dan AS. Lonjakan ini seiring dengan pertumbuhan PDB di Asia yang terus meningkat, di mana pada 2030 mencapai 35% atau setara dengan gabungan Uni Eropa dan AS. PricewaterhouseCoopers (PWC)

juga tak luput. Melalui laporan bertajuk *The Long View How Will the Global Economic Order Change by 2050*, PWC memprediksi PDB Indonesia pada 2030 mencapai USD5,42 triliun. Bahkan, angka itu akan meningkat pesat pada 2050 dengan USD10,52 triliun. Penilaian itu didasarkan pada Purchasing Power Parity (PPP). Alhasil, posisi Indonesia pun bertengger pada posisi ke-4 perekonomian besar dunia. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menegaskan optimisme tersebut melalui visi Indonesia 2045 menjadi negara maju” ([https://ekbis.sindonews.com/read/398392/34/indonesia-
menuju-ekonomi-terbesar-dunia-1618495440](https://ekbis.sindonews.com/read/398392/34/indonesia-menuju-ekonomi-terbesar-dunia-1618495440) diakses pada Sabtu 9 Oktober 2021. 15:57 WIB)

Berdasarkan berita di atas, dapat diketahui bahwa negara Indonesia di 2024 mendatang akan menduduki peringkat kelima dengan PDB tertinggi di dunia setelah China, Amerika Serikat, India dan Jepang. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian tanah air akan bergeser. Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang selama ini menjadi penunjang perekonomian Indonesia dan kekuatan ekonomi daerah. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia saat ini. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta atau 99,99% dari total sektor usaha di Indonesia dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau Rp 8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuannya dalam menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada dan meningkat hingga 60,4% dari total investasi (djn.kemenkeu.go.id, 2021). Melihat dari data di atas, Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM khususnya usaha mikro yang sangat banyak dan tingkat penyerapan tenaga kerja sangat besar.

Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia ini juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

atau Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara dinilai penting. Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain.

Pertumbuhan UKM saat ini telah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia khususnya pada Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan UKM yang ada di Jawa Timur memperlihatkan adanya pertumbuhan yang baik (Anugerah & Nuraini, 2021). Provinsi Jawa Timur jika dilihat dari letak geografisnya, berada pada kawasan yang dibidang cukup strategis yaitu berada di tengah Indonesia sehingga memiliki potensi untuk membangun industri atau usaha. Oleh sebab itu pusat perekonomian Indonesia terpusat di Pulau Jawa termasuk Jawa Timur. Hal tersebut menyebabkan banyaknya usaha-usaha yang tersebar di Jawa Timur salah satunya UKM. Data berikut menggambarkan jumlah UKM di Jawa Timur mulai tahun 2017 hingga tahun 2020.

Tabel 1.1 Jenis Usaha di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2017 – 2020

No.	Jenis	Satuan	2017	2018	2019	2020
1	Usaha Kecil	Unit Usaha	792.171	793.280	794.606	795.797
2	Usaha Menengah	Unit Usaha	21.496	22.323	23.094	23.128
3	Usaha Besar	Unit Usaha	1.181	1.201	1.228	1.231
4	Total	Unit Usaha	814.848	816.804	818.928	820.156

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur tahun 2021

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan Usaha Kecil

Menengah di Provinsi Jawa Timur selalu mengalami kenaikan jumlah usaha. Dari tahun 2017 jumlah UKM yang tersebar di Provinsi Jawa timur sebanyak 814.848 unit usaha dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 816.804 unit usaha. Kemudian dari tahun 2018 menuju 2019, jumlah UKM juga mengalami kenaikan menjadi 818.928 unit usaha. Pada tahun 2020 jumlah UKM juga mengalami kenaikan yakni 820.156 unit usaha. Dengan demikian banyaknya jumlah UKM di Provinsi Jawa Timur, diharapkan para pelaku UKM dan UMKM untuk terus meningkatkan produktivitasnya usaha serta ide nya agar dapat mengikuti perkembangan zaman saat ini.

Di zaman yang sudah serba canggih seperti sekarang ini, banyak bisnis yang semakin hari semakin berkembang. Namun pada kenyataannya, produk hasil UMKM Indonesia masih dinilai sulit untuk menembus pasar ekspor. Salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM adalah sulitnya para pelaku UMKM untuk mendapatkan solusi teknologi informasi yang tepat karena para pelaku UMKM tidak memiliki staf khusus yang ahli dalam bidangnya. Adapun kendala lain yang pelaku UMKM adalah mengenai pemasaran yang masih terbatas karena adanya kendala dalam standar mutu (Febriyantoro & Arisandi, 2018). Melihat adanya kendala yang dialami pelaku UMKM, maka pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah memberikan perhatiannya kepada pelaku UMKM di Indonesia.

Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM masuk pasar digital hingga 2024. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan sejak Mei 2020 hingga Juni 2021 telah ada 6,5 juta UMKM, sehingga total menjadi 14,5 juta unit yang telah *on boarding e-*

commerce, seperti yang ditampilkan dalam berita yang dimuat dan dikutip oleh media *online* Kemenkopukm.go.id :

“Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM digitalisasi hingga 2024. Menteri Koperasi UKM Teten Masduki menyebut perlu 6 juta UMKM masuk digital per tahun guna target itu terealisasi. "Kita punya target sampai 2024 UMKM *on boarding* di digital 30 juta. Saat ini per Mei (baru) 13,5 juta atau 21 persen. 21 persen kalau 13,5 juta dan 3 tahun (lagi untuk) 30 juta ini kan rata-rata 6 juta per tahun," ucap Teten saat berdiskusi dengan pelaku start up di Tahura, Bandung, Sabtu (12/6/2021). Teten menuturkan di Indonesia saat ini usaha yang dirintis masyarakat kebanyakan usaha mikro. Penjualan pun paling efektif melalui media sosial. Menurut Teten perlu inovasi untuk mengembangkan UMKM dalam negeri agar bisa bersaing. Salah satunya dengan digitalisasi tersebut. Oleh karena itu, di hadapan para pelaku startup, Teten mengajak untuk membantu proses digitalisasi” (<https://kemenkopukm.go.id/read/ri-kejar-30-juta-umkm-go-digital-hingga-2024> diakses pada Minggu 17 Oktober 2021. 13:34 WIB)

Berdasarkan berita di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah telah memberikan fokus pada UMKM agar produk-produk lokal dapat merambah ke pasar global. Namun untuk bisa memasuki pasar global tentu tidak mudah, karena UMKM harus bersaing dengan produk dari negara lain. Banyak UMKM dalam negeri yang berpotensi menembus pasar global, seperti *home decor*, kuliner dan buah-buahan tropis. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Pemerintah selalu mendorong produk-produk UMKM agar mampu merambah pasar global, namun terhalang dengan banyaknya kesulitan yang dialami para pelaku UMKM. Kesulitan yang dihadapi UMKM dalam melakukan ekspor antara lain yang pertama adalah masalah legalitas. Kurangnya pemahaman para pelaku UMKM terhadap legalitas, nomor pokok wajib pajak (NPWP),

pentingnya nomor induk usaha, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan izin prosedur ekspor-impor membuat pelaku UMKM kesulitan dalam mengekspor produknya ke luar negeri. Kemudian yang kedua adalah akses pembiayaan, masih banyak UMKM nasional yang masih sulit mengakses pembiayaan kepada lembaga keuangan atau perbankan nasional, serta rendahnya modal dan bangunan juga menjadi penyebab pelaku UMKM sulit berkembang. Ketiga, kurangnya pendampingan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan dan meningkatkan daya saing produk. Keempat, kurangnya standarisasi produk. Terjadinya inkonsistensi dari produksi dan kualitas produknya sehingga dapat menjadi penghalang bagi UMKM untuk menembus pasar global. Terakhir yakni terkait dengan pemasaran yang masih terbatas serta minimnya informasi terhadap peluang pasar. Juga tidak seperti perusahaan besar, UMKM yang memiliki modal lebih sedikit akan sulit memasarkan produknya di luar negeri.

Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya membantu para pelaku UMKM agar dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berinisiasi untuk semakin mendorong perluasan UMKM di wilayah Jawa Timur melalui peluncuran Program Pondok Kurasi, dengan tujuan untuk mendorong digitalisasi (*onboarding*) bagi UMKM *Offline* serta mendorong *National branding* untuk produk UMKM unggulan pada berbagai *marketplace*.

Pondok Kurasi sendiri merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas produk milik Industri Kecil Menengah (IKM) atau Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menargetkan digitalisasi ekonomi untuk meningkatkan produk dan kualitas IKM/UKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bermaksud

mengembangkan Pondok Kurasi pada 8 UPT Sub Korwil Provinsi Jawa Timur, melalui kurasi produk (penilaian kualitas produk) bagi IKM/UKM. Kurasi adalah suatu langkah kerja dan/atau kegiatan dalam melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap kegiatan UMKM. Sedangkan kurasi produk adalah penyeleksian terhadap produk UKM/IKM yang telah didaftarkan sebelum produk tersebut dapat diekspor (Exporthub.id, 2020).

Dalam Program Pondok Kurasi, terdapat beberapa tahapan yakni proses kurasi produk dan pemasaran. Kurasi produk dilakukan karena terdapat beberapa permasalahan yaitu banyaknya permasalahan kualitas produk dan kemasan dari para pelaku usaha UMKM di pasaran, sehingga sangat dibutuhkan adanya tahapan kurasi dari pihak-pihak terkait yang memiliki keahlian khusus terutama dari para penggiat UMKM. Juga masih banyak produk UMKM yang belum memiliki legalitas. Kurasi produk menjamin ketahanan dan keamanan pangan bagi konsumen serta keberlangsungan usaha dari produsen sendiri, sehingga produsen UMKM perlu mendapatkan pembinaan dan kurasi produk sebelum dipasarkan. Tujuan dari adanya pembinaan dan kurasi produk ini adalah untuk memeriksa kualitas sekaligus solusi-solusi untuk meningkatkan kualitas produk jika dibutuhkan, termasuk membuat kemasan produk yang lebih menarik dengan tetap menjaga fungsi kemasan tersebut. Maka dapat dilakukan proses kurasi produk yang terdiri dari Kurasi Legalitas Produk, Kurasi Kualitas Produk, Kurasi Kemasan Produk.

Secara singkat program ini merupakan upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi pelaku IKM/UKM untuk bisa naik kelas sehingga pelaku UMKM dibantu untuk mengkurasi produknya

agar mampu merambah pasar global. Sebagaimana yang terdapat pada pemberitaan yang dimuat dan dikutip oleh media *online* Surabaya.tribunnews.com:

“... sebagaimana dijelaskan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (7/9/2021). Ia menyampaikan, bahwa kurasi serupa dengan asesor yang akan menilai kualitas hingga kuantitas dari produk UMKM lokal untuk bisa sukses dan diminati di pasar internasional. “Kalau Pondok Kurasi itu di bawah Disperindag Jatim, saat ini sudah memiliki tujuh titik di Jatim, yang layanannya ini mengkurasi produk-produk UMKM kita agar layak dilempar ke pasar global. Oh kalau produk ini misalnya bisanya di ekspor di Timur Tengah misalnya, namun kualitasnya harus sampai sini dan seterusnya,” tegas Gubernur Khofifah” (<https://surabaya.tribunnews.com/2021/09/07/7-pondok-kurasi-jatim-bantu-umkm-lokal-rambah-pasar-ekspor>) diakses pada Selasa 2 November 2021. 12:08 WIB)

Berdasarkan berita diatas dapat diketahui bahwa Pondok Kurasi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan standar kualitas produknya serta kemasan hingga dapat berorientasi ke sektor ekspor serta dapat meningkatkan perekonomian Jawa Timur dengan pemberdayaan UMKM. Pondok ini menjadi infrastruktur yang dikhususkan untuk melalui verifikasi melalui rangkaian seleksi administrasi dan produk, guna meningkatkan daya saing produk UMKM. Proses yang dilakukan untuk bisa mengakses Pondok Kurasi ini yaitu dengan seleksi kelengkapan administrasi, kemudian bagi pelaku UMKM yang lolos akan diikutkan *business meeting*, Kemudahan mengakses Bangsa Buatan Indonesia (BBI), Misi dagang, sertifikasi merk dan lain-lain. Hingga pada kemudian kurator akan menyeleksi dan Pelaku UMKM tersebut mendapatkan pendampingan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur memiliki delapan (8) UPT sebagai lembaga untuk melakukan kurasi UKM. Perlu pengembangan Pondok Kurasi sebagai sekretariat dan tempat kurasi dan perlu

difungsikan agar kegiatan kurasi dapat berjalan lancar sesuai sub koor wilayah (korwil) yang telah ditentukan. Data berikut menggambarkan jumlah UKM yang terdaftar pada Program Pondok Kurasi, yang tersebar pada 8 Sub Korwil dengan rincian dibawah ini :

Tabel 1.2 Jumlah UKM pada 8 Sub Korwil (UPT) di Jawa Timur

No.	Uraian	UKM	Lolos	Tidak Lolos
	Koordinator I			
1	Sub KorWil Sidoarjo meliputi:			
a.	Kabupaten Sidoarjo	46	18	28
b.	Kabupaten Gresik	15	7	8
c.	Kabupaten Mojokerto	13	-	13
d.	Kota Mojokerto	22	-	22
2	Sub KorWil Pasuruan meliputi:			
a.	Kota Pasuruan	10	-	10
b.	Kota Probolinggo	19	-	19
c.	Kabupaten Pasuruan	14	-	14
d.	Kabupaten Probolinggo			
	Koordinator II			
3	Sub KorWil Surabaya meliputi:			
a.	Kota Surabaya	24	14	11
b.	Kabupaten Bangkalan	4	-	4
c.	Kabupaten Sampang	-	-	-
d.	Kabupaten Pamekasan	1	-	1
e.	Kabupaten Sumenep	1	-	1
	Koordinator III			
4	Sub KorWil Malang meliputi:			
a.	Kota Malang	32	7	25
b.	Kabupaten Malang	40	10	30
c.	Kota Batu	2	-	2
d.	Kota Blitar	1	1	0
e.	Kabupaten Blitar	3	1	2
5	Sub KorWil Bojonegoro meliputi:			

No.	Uraian	UKM	Lolos	Tidak Lolos
a.	Kabupaten Bojonegoro	9	-	9
b.	Kabupaten Tuban	5	-	5
c.	Kabupaten Lamongan	-	-	-
d.	Kabupaten Jombang	6	-	6
e.	Kabupaten Nganjuk	5	-	5
	Koordinator IV			
6	Sub KorWil Kediri meliputi:			
a.	Kota Kediri	17	2	15
b.	Kabupaten Kediri	3	-	3
c.	Kabupaten Tulungagung	-	-	-
d.	Kabupaten Trenggalek	-	-	-
e.	Kabupaten Pacitan	-	-	-
7	Sub KorWil Magetan meliputi			
a.	Kota Madiun	-	-	-
b.	Kabupaten Madiun	-	-	-
c.	Kabupaten Magetan	15	-	15
d.	Kabupaten Ponorogo	-	-	-
e.	Kabupaten Ngawi	4	-	4
	Koordinator V			
8	Sub KorWil Jember meliputi:			
a.	Kabupaten Jember	62	37	24
b.	Kabupaten Lumajang	-	-	-
c.	Kabupaten Bondowoso	-	-	-
d.	Kabupaten Situbondo	-	-	-
e.	Kabupaten Banyuwangi	1	1	0
	Total	374	98	276

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur tahun 2021

Dari tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa terdapat 374 UKM yang telah mendaftar sebagai peserta Pondok Kurasi dari delapan UPT yang tersebar. Dari 374 UKM terdapat 98 UKM yang lolos proses kurasi dan 276 yang tidak lolos proses kurasi. Terdapat banyak jenis UMKM yang didaftarkan diantaranya terdapat produk *handycraft*, produk makanan, produk *fashion*, serta *home decor*, dan lain lain, Berikut adalah produk-produk yang lolos proses kurasi:

Tabel 1.3 Produk UKM yang lolos proses kurasi

No.	Produk UKM	Jumlah
1.	Makanan dan Minuman	53 Pelaku Usaha
2.	<i>Handycraft</i>	21 Pelaku Usaha
3.	<i>Fashion</i>	12 Pelaku Usaha
4.	Batik	10 Pelaku Usaha
5.	<i>Homedecor</i>	2 Pelaku Usaha
	Total	98 Pelaku Usaha

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tahun 2021

Dalam hal ini untuk UKM yang tidak lolos proses kurasi akan di bina ulang sesuai dengan tahap di mana pelaku UKM tidak diloloskan. Kemudian untuk UKM lolos proses kurasi akan diprioritaskan untuk mengikuti promosi baik dalam dan luar negeri di Gerai Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Expo Center.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menargetkan 1000 UKM yang dapat lolos proses kurasi sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk serta pangsa pasar baik dalam dan luar negeri melalui Program Pondok Kurasi ini. Namun diketahui bahwa program ini baru diluncurkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada Mei 2021, oleh karena itu masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada proses kurasi dan pembinaan pelaku usaha dalam mengembangkan produk usahanya.

Seperti yang sudah diketahui bahwa batik merupakan ciri khas kain dari bangsa Indonesia. Unit usaha kerajinan batik juga merupakan salah satu aspek ekonomi yang termasuk ke dalam masyarakat, khususnya golongan menengah dan bawah dalam usaha mencapai kesejahteraan. Kekuatan budaya yang terkandung dalam batik sendiri mampu meningkatkan nilai tambah produk di bidang *fashion*

yang dinilai berpotensi untuk dipasarkan tidak hanya di Indonesia melainkan hingga ke luar negeri, sehingga sangat berperan penting bagi perekonomian nasional. Data berikut merupakan jumlah UKM batik yang lolos proses kurasi yang tersebar di Jawa Timur dengan rincian dibawah ini:

Tabel 1.4 Jumlah UKM Batik yang lolos proses kurasi

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah UKM
1	Kabupaten Sidoarjo	2 Pelaku Usaha
2	Kabupaten Gresik	4 Pelaku Usaha
3	Kabupaten Jember	3 Pelaku Usaha
4	Kota Surabaya	1 Pelaku Usaha
	Total	10 Pelaku Usaha

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur tahun 2021

Dari 98 pelaku usaha yang lolos proses kurasi terdapat 10 pelaku usaha yang produknya adalah batik. Dengan adanya produk batik yang tersebar di Jawa Timur ini diharapkan dukungan berupa fasilitas program pondok kurasi dan melibatkan aspek manusia, pemasaran, dan kelembagaan akan ini dapat terus berupaya mengembangkan serta menjadi pendukung keberadaan industri batik nasional sehingga mampu bersaing di pasar global Hariyoko et al., (2021).

Dalam menjalankan program pemerintah 30 juta UMKM digitalisasi khususnya pada UMKM di Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menunjukkan perannya sebagai fasilitator atas program pemerintah pusat. Berdasarkan data yang telah diuraikan, penulis melihat bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan proses kurasi melalui Program Pondok Kurasi, oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian mengenai pemberdayaan UMKM melalui Program Pondok Kurasi. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui**

Program Pondok Kurasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian sebagai berikut “Bagaimana Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Pondok Kurasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Pondok Kurasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menunjang pendidikan dan bahan pembandingan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Mahasiswa

- a) Dapat memperdalam pengetahuan tentang Program Pondok Kurasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan UMKM.
- b) Dapat menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan program studi Administrasi Publik.

3. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan perannya guna membantu para pelaku UMKM di Jawa Timur.